

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan otonomi daerah dan memberikan kontribusi besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Azlina, 2019). Sebagai bagian dari akuntabilitas tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) sebagai wujud tanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan daerah dalam satu periode (Pasolo et al., 2023). Laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan umum memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelaporan. Tujuannya adalah memberikan manfaat bagi pengguna laporan dalam pengambilan dan evaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan diharapkan memenuhi standar karakteristik yang memadai.

Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak memenuhi karakteristik yang memadai, akibatnya adalah kesalahan dalam pengambilan Keputusan untuk mengalokasikan dana. Dampaknya mencakup risiko kerugian daerah, potensi kekurangan dana, penurunan penerimaan, kelemahan administratif, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dalam pemanfaatan sumber daya (Pasolo et al., 2023). Laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sarana pelaporan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan khususnya masyarakat.

Dari sudut pandang masyarakat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disiapkan dengan mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki potensi untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah mengelola keuangan untuk melaksanakan pembangunan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya standar ini ditekankan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dimana pemerintah merevisi terhadap standar akuntansi pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan. PP 71 tahun 2010 ini menggantikan PP No.24 tahun 2005.

Dalam transformasi ini, peralihan dari standar akuntansi sektor publik yang semula berbasis kas menjadi standar akrual (cash toward accrual) mencerminkan peralihan menjadi standar berbasis akrual (Accrual Basis). Harapannya, implementasi SAP berbasis akrual dapat mengatasi permasalahan umum mengenai buruknya kualitas pelaporan keuangan yang sering dihadapi instansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik, yaitu relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami (PP No.71 tahun 2010 dalam Permadi, 2009: 3).

Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki manfaat yang signifikan bagi para pengguna (Rosana & Bharata, 2023). Manfaat informasi terletak pada nilai yang dimilikinya (Haza, 2015). Informasi dianggap bermanfaat jika mampu mendukung proses pengambilan keputusan dan dapat dimengerti dengan baik oleh para pengguna. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi para pengguna, informasi tersebut harus memenuhi standar kualitas tertentu.

Kesuksesan pemerintah dapat tercermin dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memiliki kualitas yang baik (Nurhayati et al., 2019). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dianggap baik jika memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sejak diberlakukan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan tersebut juga diwajibkan untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Nurhayati et al., 2019).

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sangatlah sulit. Meskipun demikian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY tahun 2022, sebagaimana yang dilansir dalam Jawa Pos, (2023) diketahui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP LKPD DIY 2022 ini menjadi yang ke-13 kalinya diraih oleh DIY secara berturut-turut (Jawa Pos, 2023). Yang berarti terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Pendapat WDP diberikan ketika laporan keuangan dianggap wajar dalam hal materi, namun terdapat ketidak lengkapan atau kekurangan pada suatu pos tertentu sehingga perlu dikecualikan.

Pencapaian yang diraih oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tidak sama dengan pencapaian daerah lain yang masih harus meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dapat direalisasikan dengan baik memiliki beberapa faktor lain yang mendukung salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat berkaitan dengan Kualitas laporan keuangan daerah, terutama aspek keterandalan dan ketepatanwaktuan, menjadi fokus utama. Pemanfaatan Teknologi Informasi merujuk pada tindakan menggunakan berbagai alat untuk menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyampaikan informasi.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta memfasilitasi penyaluran informasi keuangan daerah kepada publik (PP No. 56 Tahun 2005). Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh unit

kerja di tingkat daerah dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern melalui penggunaan kendali komputer. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan akurasi informasi (Nurhayati et al., 2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi ini juga berperan penting dalam mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah, menjaga ketepatanwaktuan informasi dalam laporan keuangan.

Selain wajib untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yakni sistem informasi akuntansi. Program sistem informasi akuntansi diciptakan untuk dapat menyederhanakan dan mengintegrasikan pelaporan keuangan untuk dapat mencapai laporan keuangan yang bersifat transparan dan akuntabel. Sistem informasi adalah kumpulan elemen atau sumber daya, jaringan prosedur yang saling berhubungan, terintegrasi ke dalam hierarki tertentu, dan dimaksudkan untuk mengubah data menjadi informasi.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan elemen organisasi yang bertugas mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis informasi keuangan yang relevan, dan mengomunikasikannya baik kepada pihak internal maupun eksternal untuk mendukung proses pengambilan keputusan (B. Pratama, 2017). Sistem Informasi Akuntansi yang efektif akan menghasilkan informasi bermutu dalam laporan keuangan. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi karakteristik kualitatif tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif tersebut melibatkan aspek relevansi, keandalan, kemampuan perbandingan, dan kemudahan pemahaman.

Mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan daerah merupakan tujuan setiap organisasi satuan kerja perangkat daerah. Sehingga diperlukan komitmen organisasi dalam hal tersebut. komitmen organisasi merupakan faktor yang memiliki

peranan penting. Komitmen Organisasi mencakup keinginan seseorang untuk tetap menjadi bagian dari suatu organisasi. Tingkat komitmen yang kuat menandakan bahwa individu tersebut bersedia mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan berupaya maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Komitmen Organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai terhadap nilai-nilai organisasi, kesediaan pegawai untuk membantu mencapai tujuan organisasi, dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Hal ini membawa dampak positif berupa rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pegawai terhadap organisasi. Ketika pegawai merasa terikat dengan nilai-nilai organisasional, mereka cenderung menikmati pekerjaan, memiliki tanggung jawab, kesadaran dalam menjalankan tugas organisasional, dan termotivasi untuk melaporkan aktivitas, termasuk melaksanakan akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan (Lubis et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ayem & Amahala, (2023) dengan judul pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta), mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil terkait komitmen organisasi tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Setyowati, (2019) dengan judul “pengaruh komitmen organisasional, sistem informasi akuntansi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan”, Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa komitmen organisasional, sistem informasi akuntansi, dan audit internal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Selaras dengan penelitian yang dikemukakan oleh Nita, (2023) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Tampaksiring” diketahui bahwa sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan dari Hanafi, (2019) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah di pemerintah daerah Kota Yogyakarta tahun 2018”. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000, 0,048, dan 0,000.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada waktu yakni di tahun 2023, lokasi penelitian yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta, teori penunjang terkait dengan pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, dan kualitas laporan menggunakan teori yang terbaru, dan objek penelitian yakni di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut adalah terletak pada teknik analisis data dan variabel yang diangkat yakni terkait pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, dan kualitas laporan keuangan. Sehingga berdasarkan adanya persamaan dan perbedaan tersebut memberikan unsur kebaruan dalam penelitian ini sebagai salah satu syarat dilakukannya penelitian.

Berdasarkan fenomena lapangan dan perbedaan hasil yang didapatkan oleh beberapa penelitian terdahulu mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta**”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam upaya memperbaiki kualitas laporannya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas adapun rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas adapun tujuan penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan komitmen informasi terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia akademis dengan kontribusi peningkatan ilmu dan pemahaman terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan wawasan baru kepada peneliti tentang kualitas laporan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja